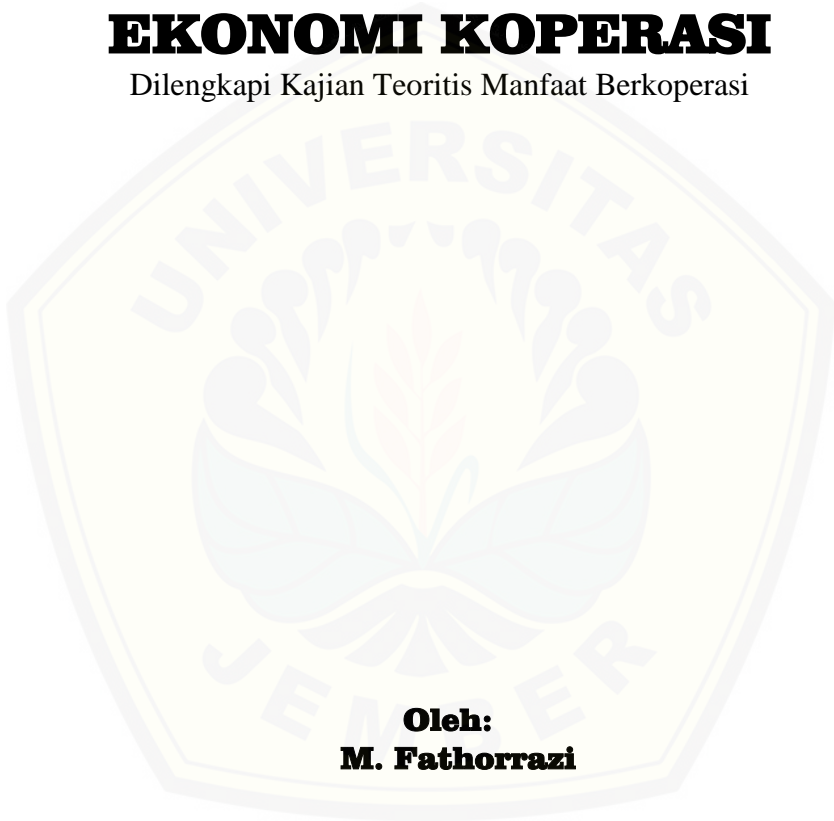


EKONOMI KOPERASI

Dilengkapi Kajian Teoritis Manfaat Berkoperasi



Oleh:
M. Fathorrazi

EKONOMI KOPERASI

Dilengkapi Kajian Teoritis Manfaat Berkoperasi

Diterbitkan oleh

UPT Penerbitan UNEJ

Jl. Kalimantan 37 Jember 68121

Telp. 0331-330224, Psw. 319, Fax. 0331-339029

E-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Cetakan pertama 2010

Cetakan kedua 2017

Cover/layout: Noerkoentjoro W.D.

Perpustakaan Nasional RI – Katalog Dalam Terbitan

334

FAT

k

Fathorrazi, M

Ekonomi Koperasi: dilengkapi kajian teoritis manfaat berkoperasi/oleh Fathorrazi.--Jember: Jember University Press, 2010 xvii, 322 hlm. ; 21 cm.

ISBN: 978-602-61803-7-7

1. KOPERASI

I. Judul

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

PRAKATA

Sejalan dengan adanya peningkatan pengetahuan serta sistem komunikasi, terasa telah terjadi penyempitan dunia menjadi hanya sebuah desa. Akibatnya apa yang terjadi di belahan negara lain dapat disaksikan di suatu negara, dan barang yang dijual di suatu negara bisa juga dijumpai di negara lainnya. Akibat terakhir ialah semua perusahaan (tidak terkecuali koperasi) yang ada dalam suatu industri harus mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu meningkatkan efisiensi.

Menghadapi kenyataan seperti itu maka para insan koperasi dituntut untuk bisa mengembangkan koperasi agar selaras dengan nafas perekonomian dunia yang mengglobal dengan senjata utamanya perdagangan bebas yang semakin meluas. Kewajiban untuk mengembangkan koperasi bukan hanya dapat diemban oleh manajer dan anggota koperasi itu sendiri, melainkan dapat dirintis oleh pemerintah bahkan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, tindakan yang dipandang bijaksana ialah apabila kita memulai memberikan informasi yang benar dan sebenar-benarnya tentang koperasi dari perguruan tinggi sebagai tempat untuk melahirkan sumber daya penerus pembangunan bangsa, yang siap menghadapi tantangan perubahan dunia. Berkaitan dengan itu, dalam rangka ikut memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan akan bahan bacaan yang berkaitan dengan Teori Ekonomi Koperasi, maka buku ini disajikan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Buku ini sengaja diberi judul Ekonomi Koperasi karena sebagian besar berisi uraian tentang aplikasi Teori Ekonomi bagi koperasi. Pada Bab 1 sampai Bab 12 pembaca akan mendapatkan gambaran umum tentang koperasi. Apa dan bagaimana mekanisme kerja koperasi serta apa perbedaannya dengan badan usaha bentukan kapitalis. Hal itu sangat penting mengingat koperasi didirikan setelah kapitalisme diperkenalkan, sehingga mekanisme kerja koperasi diharapkan dapat mendatangkan keunggulan dibandingkan badan usaha lainnya. Tujuan utamanya pembahasan dalam bab-bab pendahuluan ini adalah agar pembaca dapat mengidentifikasi koperasi merupakan jenis binatang apa?.

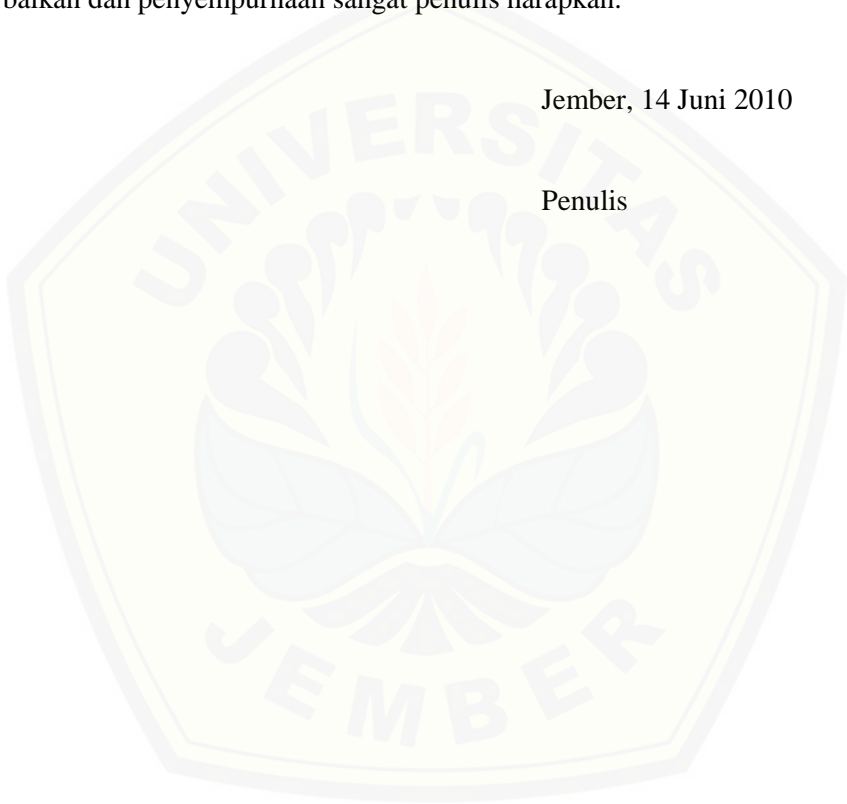
Pada bab selanjutnya diuraikan aplikasi teori ekonomi pada koperasi. Pada tahap ini pembaca diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan koperasi sehingga diharapkan dapat membangun persepsi bahwa dari sejak rencana pendirian suatu badan usaha telah terpikirkan dan teranalisis secara matang, apakah mendirikan koperasi atau bentuk badan usaha lainnya, sehingga tidak asal mendirikan suatu bentuk badan usaha dan tidak asal ikut menjadi anggota koperasi, sedangkan bagian akhir memuat tentang manfaat koperasi yang merupakan

aplikasi dari beberapa teori (terutama teori ekonomi) untuk mengidentifikasi manfaat koperasi karena bentuknya yang unik maupun mekanisme kerjanya yang menciptakan keunggulan.

Buku ini adalah edisi pertama yang tentu saja masih sangat mungkin mengandung kelemahan dan kekurangan. Perbaikan dan penyempurnaan tidak mungkin hanya bersumber dari ide penulis semata. Ide dan pengalaman dari pembaca sangat mungkin akan relevan dengan pembahasan dalam buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Jember, 14 Juni 2010

Penulis



KATA PENGANTAR.

Tanggal 12 Juli adalah “Hari Koperasi”, setiap tanggal 12 Juli kita memperingati “Hari Koperasi”, tujuannya adalah untuk menengok ke belakang melihat sejarah perjuangan para pendahulu kita dalam membangun koperasi serta melihat sampai dimana upaya kita bersama dalam membangun koperasi. Sebab kita yakin dengan koperasi kita akan dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita dibidang keadilan sosial. Tanggal 12 juli 2010 yang lalu kita juga memperingati “Hari Koperasi”. Kali ini adalah yang ke-63. Dalam memperingati “Hari Koperasi” yang ke-63 ini, disatu sisi kita bangga, tetapi kita juga merasa cemas, disisi lainnya. Kita bangga karena ditengah - tengah situasi seperti yang kita rasakan dewasa ini, koperasi masih eksis, disamping swasta dan BUMN. Kita cemas, karena dalam usia yang demikian panjang koperasi belum berperan secara maksimal sebagai soko guru ekonomi rakyat dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, menurut konstitusi kita, Undang Undang Dasar 1945, koperasi merupakan salah satu sarana pokok untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian nasional. Koperasi menjadi sarana politik ekonomi, untuk mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena itu koperasi harus terus dipelajari dan didalami, mulai dari sejarah, serta teori yang mendasarinya yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta realisasinya di lapangan.

Sebagai pengamat, dan pelaku usaha koperasi, bahkan pernah mendapat kesempatan menjabat sebagai Menteri Koperasi (1993-1998) dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (1999-2000) saya merasa gembira dapat memenuhi permintaan untuk memberikan kata pengantar pada buku “Ekonomi Koperasi”, hasil karya Sdr. M. Fathorazi ini.

Karena itu, ditengah-tengah kesibukan saya dalam ikut mengelola Yayasan Damandiri yang bergerak dibidang kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya meluangkan waktu untuk mengajak para pembaca buku ini untuk sekilas menengok ke belakang menelusuri sejarah koperasi, melihat bagaimana seharusnya koperasi bekerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita dibidang kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berbicara tentang sejarah koperasi di Indonesia, kita tidak dapat lepas dari pandangan dan pikiran Bung Hatta, meskipun kita menyadari bahwa Bung Hatta bukan hanya seorang ahli ekonomi dan Bapak Koperasi

belaka. Bung Hatta adalah salah satu pejuang kemerdekaan bangsa yang mempunyai cita-cita agar dalam lingkungan Indonesia Merdeka, rakyat Indonesia dapat hidup dalam situasi yang damai, makmur, dan sejahtera.

Dalam konteks yang saya kemukakan tadi, saya rasa, bagi Bung Hatta, berpolitik untuk mencapai kemerdekaan agar bangsa Indonesia dapat melakukan pembangunan bagi kepentingan seluruh rakyat merupakan obsesi beliau. Karena itu Bung Hatta, tidak saja bergerak dibidang politik dan ekonomi, tetapi juga dibidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan kemerdekaan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Karena itu bagi Bung Hatta, bangun ekonomi-politik yang sesuai dengan pandangan dan cita-cita beliau adalah koperasi. Bagi beliau koperasi merupakan fondasi ekonomi bangsa dan sekaligus sarana demokrasi yang akan menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta merupakan koreksi terhadap sistem ekonomi perencanaan yang ketat (sistem ekonomi komunis) dan sistem ekonomi pasar terbuka (sistem ekonomi kapitalistik). Dan apabila dilihat dari dimensi ideologi, koperasi merupakan sintesa dari politik ekonomi pasar dan politik ekonomi negara. Konsepsi yang menyeimbangkan antara peranan individu dengan peranan masyarakat dan sekaligus menjadi sintesa yang menyeimbangkan peranan badan-badan publik: negara, masyarakat, dan warganya.

Dewasa ini telah enam puluh lima tahun bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, namun kemerdekaan politik yang telah kita miliki sekian lama itu, belum dinikmati bangsa Indonesia dibidang ekonomi. Kita masih harus terus berjuang dibidang ekonomi agar bangsa Indonesia juga merdeka secara ekonomi. Sebab, dewasa ini bangsa kita masih sangat tergantung kepada bangsa-bangsa lain, dibidang pangan, energi, dan berbagai bidang industri, sehingga kemiskinan belum dapat kita atasi, pengangguran masih sangat luas, kesenjangan antara mereka yang kaya dan yang miskin terus bertambah lebar dan keamanan belum dapat kita nikmati bersama. Dalam situasi yang demikian tadi kita juga merasakan bertambah besarnya tekanan globalisasi; hampasan pasar bebas makin dahsyat menghantam sendi-sendi perekonomian bangsa kita.

Dalam situasi yang tidak mudah tadi, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus melakukan upaya untuk mengubah politik-ekonomi kita dengan cara merevitalisasi ekonomi politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Jalan yang harus kita tempuh dalam merevitalisasi ekonomi-politik bangsa kita terletak pada peran dan fungsi yang dilakukan oleh agen keekonomian kita, yaitu: koperasi, BUMN, dan Swasta. Namun harus kita sadari bahwa upaya untuk merevitalisasi politik-ekonomi bangsa kita bukanlah upaya yang mudah. Itu merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan secara terus menerus oleh kita semua.

Dalam kaitan ini, sejarah menunjukkan bahwa upaya membangun koperasi di Indonesia, selalu dihadapkan kepada berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Secara internal, koperasi adalah suatu organisasi badan usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan dan efisiensi ekonomi para anggotanya yang sebagian besar adalah usaha-usaha mikro atau kecil yang tidak layak. Namun banyak kalangan yang menganggap bahwa konsep dan organisasi dan manajemen koperasi tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Konsep Koperasi.

Sampai saat ini kita masih terus berdebat tentang dua konsep yang kadang-kadang terasa berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. Disatu pihak ada yang menyatakan bahwa konsep koperasi sejati adalah badan usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Sedang pandangan lainnya menyatakan bahwa koperasi sejati adalah badan usaha yang benar-benar menerapkan identitas ganda, yaitu bahwa anggota adalah pemilik dan pelanggan sekaligus.

2. Struktur Organisasi.

Dalam struktur organisasi, koperasi terdiri dari pengurus dan pengawas. Dalam perkembangannya mengingat yang menjadi pengurus koperasi adalah para anggota yang mungkin kurang profesional, maka diterapkan konsep untuk memasukkan tenaga manajemen profesional. Akibatnya, organisasi koperasi menjadi tidak efisien karena menciptakan lembaga yang gemuk dan tidak ramping.

3. Manajemen Koperasi.

Dengan perbedaan konsepsi sebagaimana yang saya uraikan diatas, maka timbul permasalahan dalam orientasi manajemen. Apakah manajemen berorientasi kepada anggota atau non anggota. Jika manajemen belum dapat menentukan orientasinya secara jelas, maka dapat dipastikan akan terjadi *missmanagement*.

4. Keuntungan Koperasi.

Dalam hal menentukan keuntungan ada pihak yang menerapkan konsep agar koperasi harus mengambil keuntungan agar tercapai kelangsungan usahanya. Di lain pihak ada yang menyatakan bahwa keuntungan koperasi adalah memberikan manfaat ekonomi bagi para anggota, baru kemudian diusahakan untuk mendapat sisa hasil usaha untuk kelanjutan usahanya.

5. Kewirausahaan

Dalam konsep kewirausahaan ada yang berpendapat bahwa masing-masing anggota mengembangkan usahanya secara sendiri-sendiri.

Sedang di lain pihak, ada yang menyatakan bahwa usaha anggota harus berkembang secara bersama-sama.

6. Kerjasama.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, koperasi harus meningkatkan jaringan dengan bekerja sama dengan lembaga lain. Tetapi, dalam hal kerjasama ada yang berpendapat bahwa jaringan tersebut harus dibentuk antar koperasi, sementara yang lain berpendapat bahwa jaringan tersebut harus dibentuk bekerjasama dengan perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta.

Keenam masalah internal tadi seringkali menjadi masalah yang selalu hadir dalam perjalanan koperasi.

Adapun masalah eksternal koperasi timbul dalam proses perkembangannya. Ada yang mengatakan bahwa pembangunan koperasi harus dimulai dari anggotanya. Sebaliknya ada pula yang menyatakan bahwa mengingat anggota koperasi dalam kondisi yang lemah, maka koperasi harus dibantu oleh pemerintah pada awal pertumbuhannya agar dalam pertumbuhan selanjutnya koperasi dapat berkembang secara mandiri.

Tentu saja masalah internal dan eksternal sebagaimana yang saya sebutkan tadi merupakan masalah yang harus dipecahkan bersama jika kita menginginkan koperasi tumbuh besar, bermanfaat, dan bermartabat.

Dalam rangka upaya mengembangkan koperasi, secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa kendala utama yang dihadapi koperasi dewasa ini adalah masalah pemasaran dan permodalan. Dibidang pemasaran misalnya, koperasi selalu kalah bersaing dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan oleh para anggotanya dengan perusahaan swasta, lebih-lebih swasta asing. Sedang dibidang permodalan, koperasi juga belum dapat melayani anggota-anggotanya dalam memberikan pinjaman tanpa anggungan dengan bunga yang lebih rendah dari bunga bank. Sesungguhnya kedua kendala eksternal yang dihadapi koperasi tadi, dapat kita jadikan "kata kunci" dalam menentukan strategi pengembangan koperasi.

Dibidang pemasaran, kekurangan koperasi dapat diatasi dengan bantuan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah membangun sebuah lembaga semacam *trading house* yang berskala nasional maupun internasional. Tugas lembaga ini adalah menyalurkan sarana produksi dengan harga yang relatif rendah dan terjangkau oleh anggota koperasi dengan prosedur yang mudah. Lembaga ini juga bertugas untuk membantu koperasi dalam berbagai aspek, seperti memilih komoditi yang diminta pasar, sehingga barang-barang yang akan dihasilkan para anggota koperasi akan memiliki peluang pasar yang baik. Selanjutnya lembaga ini juga membantu koperasi dengan menyalurkan sarana produksi, serta

memberikan bantuan teknologi dan manajemen. Untuk menjaga stabilitas harga dipasar, lembaga ini juga bertugas untuk melalui koperasi membeli sebagian dari hasil produksi anggotanya.

Upaya pemerintah untuk membentuk lembaga *"trading house"* ini perlu segera dilakukan. Karena, disamping telah menjadi kebutuhan yang mendesak, juga merupakan wujud dari pelaksanaan amanat konstitusi dalam membangun koperasi. Bagi pemerintah sendiri upaya membentuk lembaga yang demikian tadi bukanlah merupakan hal yang sulit karena pemerintah dapat menugasi perusahaan negara yang telah ada untuk berfungsi sebagai *"trading house"* koperasi. Dalam pandangan saya Bulog merupakan lembaga yang paling tepat untuk melaksanakan gagasan tadi. Pandangan saya ini didasari oleh kenyataan bahwa Bulog telah memiliki infrastruktur yang kuat, jaringan yang meluas diseluruh Tanah Air, dan bertujuan untuk menjadi lembaga yang handal untuk memantapkan ketahanan pangan nasional. Selain itu Bulog juga memiliki misi yang selaras dengan koperasi, seperti menyelenggarakan tugas pelayanan publik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pangan nasional, menyelenggarakan kegiatan ekonomi dibidang pangan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat kepada perekonomian nasional, menyelenggarakan kegiatan ekonomi dibidang pangan, dan kegiatan yang lain secara berkelanjutan dan bermanfaat kepada *stakeholders*, menjalankan usaha dibidang produksi, pemasaran, dan jasa dibidang komoditi pangan guna mendukung program pengembangan hasil pertanian khususnya pangan dan bidang lainnya dengan upaya memaksimalkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan menghasilkan laba.

Dalam pada itu, untuk mengatasi masalah permodalan, pemerintah dapat menugaskan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai lembaga yang bisa menjamin koperasi untuk mengatasi masalah kekurangan modal. BRI juga merupakan lembaga keuangan yang tepat karena disamping manajemen yang baik dan moderen juga luas jangkauan kegiatannya sampai ke desa-desa. Melalui dukungan BRI, koperasi bisa terus mengembangkan usaha dibidang ekonomi mikro dan simpan pinjam yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan permodalan yang diberikan oleh BRI dan pemanfaatan jaringan koperasi simpan-pinjam di pedesaan diharapkan penyaluran kredit kepada masyarakat akan lebih efisien dan dana masyarakat pedesaan akan berputar disekitar pedesaan pula. Dewasa ini BRI merupakan salah satu Bank Pemerintah yang besar dan mempunyai unit kerja yang jumlahnya mencapai 4.447.buah.

Tentu saja disamping dua hal yang telah saya sebut tadi, strategi pengembangan koperasi perlu didukung oleh gerakan nasional yang harus dilakukan secara serentak, yaitu:

Pertama, Gerakan Efisiensi Nasional atau Gerakan Pola Hidup Sederhana. Melalui gerakan ini diharapkan masyarakat dapat berubah dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat yang produktif.

Kedua, Gerakan Cinta Produksi Dalam Negeri. Jika gerakan ini dilancarkan dan berhasil dengan baik, maka akan tersedia pasar yang besar bagi hasil produksi dalam negeri, khususnya produksi pertanian. Hasil survey BPS Juli 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237,5 juta jiwa. Jumlah penduduk yang demikian besar tentulah merupakan potensi pasar yang besar, yang bila digali akan dapat membangkitkan daya saing ekonomi bangsa Indonesia. Masalah ini merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji mengingat sampai saat ini Indonesia merupakan negara agraris yang masih mengimport produk-produk pertanian dan pangan. Dengan melancarkan Gerakan Efisiensi dan Gerakan Cinta Produksi Dalam Negeri, potensi kita untuk menjadi bangsa yang besar dan mandiri akan dapat kita wujudkan, jika kita melaksanakannya secara serius dan berkesambungan.

Usaha untuk meningkatkan daya saing koperasi memang bukan usaha yang mudah. Kuncinya terletak pada komitmen pemerintah dan kita semua untuk membangkitkan koperasi melalui kemitraan dengan perusahaan negara agar mempunyai daya saing yang tinggi. Dengan komitmen yang demikian tadi kita berharap koperasi dapat menjalankan amanatnya sebagai salah satu soko guru sistem Perekonomian Nasional yang memiliki kontribusi yang besar bagi bangsa kita dalam mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan, menumpas kerusuhan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Berbagai masalah koperasi sebagaimana yang saya kemukakan diatas, sesungguhnya telah dibahas secara lebih mendalam dan lengkap, bahkan disertai teori ekonomi yang mendasarinya dalam buku ini. Karena itu buku ini dapat dikatakan merupakan "**Buku Induk Koperasi**". Buku ini kaya akan gagasan dan ide yang dapat digunakan masyarakat pemerhati koperasi untuk dipelajari guna mencari konsepsi yang paling tepat agar koperasi mampu menghadapi persaingan yang makin keras di masa globalisasi sekarang ini.

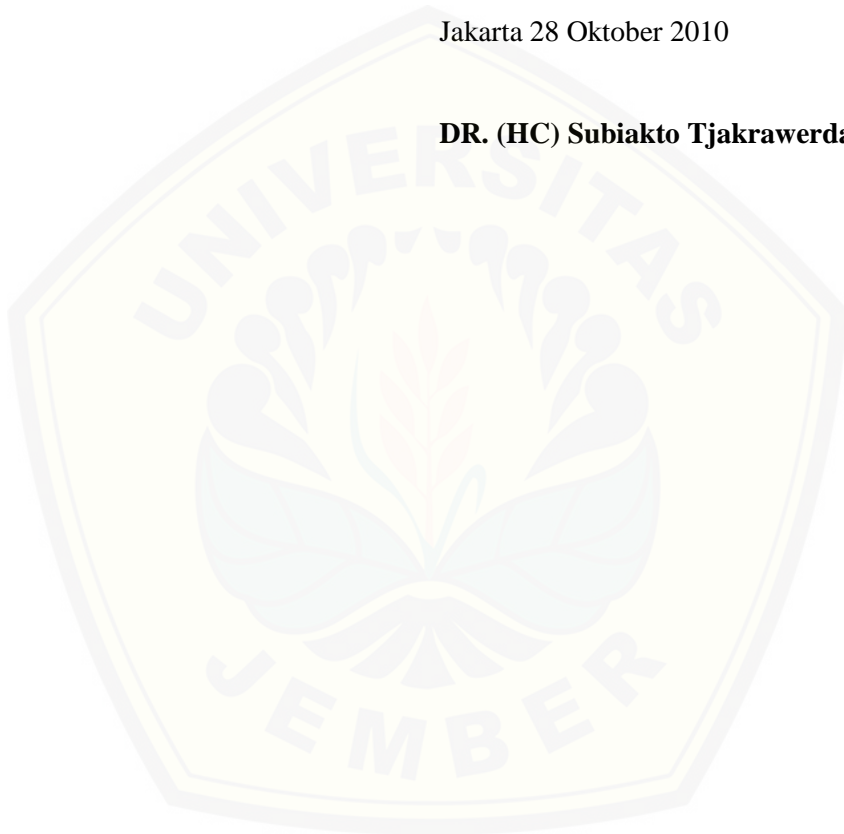
Menyudahi kata pengantar untuk buku ini saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa bangga dan sekaligus terharu melihat kegigihan penulis dalam melakukan riset, sehingga berhasil menuangkannya dalam buku ini. Ditengah-tengah banjirnya buku-buku yang mengagungkan neoliberalisme yang menolak koperasi dan BUMN dengan

memuja swastanisasi dan perusahaan asing (MNC), kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas terbitnya buku ini.

Semoga terbitnya buku ini menyadarkan dan sekaligus memperkaya kita dalam memperluas pengetahuan tentang ekonomi dan koperasi serta mendorong kita untuk membangkitkan kembali koperasi. Sebab membangun ekonomi melalui koperasi merupakan amanat para pendahulu kita, pendiri negara ini, yang tertulis dalam konstitusi.

Jakarta 28 Oktober 2010

DR. (HC) Subiakto Tjakrawerdaja



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Posisi Sistem Koperasi diantara Sistem Ekonomi	1
1.2. Deskripsi Buku	4
II. SEJARAH KOPERASI	7
2.1. Gerakan Koperasi di Inggris	11
2.2. Gerakan Koperasi di Jerman	15
2.3. Gerakan Koperasi di Perancis	18
2.4. Gerakan Koperasi di Indonesia	20
III. PENGERTIAN KOPERASI	39
3.1. Definisi Koperasi	40
3.1.1. Golongan Esensialis	41
3.1.2. Golongan Institusional	43
3.1.3. Definisi Golongan Nominalis	43
3.1.4. Definisi Ekonom Modern	45
3.2. Beberapa Pengertian Koperasi	48
3.3. Manfaat Koperasi	50
IV. SENDI – SENDI DASAR KOPERASI	55
4.1. Sejarah Prinsip Koperasi	56
4.2. Prinsip Koperasi	61
4.3. Prinsip Koperasi Indonesia	69
4.4. Landasan Koperasi Indonesia	70
4.5. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain	71
V. FUNGSI DAN PERAN KOPERASI	75
5.1. Fungsi Koperasi	75
5.2. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi	77
5.3. Fungsi koperasi dalam Bidang Sosial	78
5.4. Peran Koperasi di Indonesia	78
VI. ORGANISASI KOPERASI	81
6.1. Ciri Umum Organisasi Koperasi	82
6.2. Jenis Koperasi	87

6.3.	Pembentukan Koperasi	93
6.4.	Pembubaran Koperasi	104
VII.	PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI	107
7.1.	Rapat Anggota	108
7.2.	Pengurus	113
7.3.	Pengawas	115
7.4.	Pengelola atau Manager Koperasi	116
VIII.	PERMODALAN DAN SHU KOPERASI	127
8.1.	Permodalan Koperasi	128
8.2.	Sisa Hasil Usaha (SHU)	136
IX.	ANGGARAN DASAR KOPERASI	141
9.1.	Definisi dan Sifat Hukum Anggaran Dasar	144
9.2.	Hubungan Anggaran Dasar dengan Peraturan Undang – Undang	147
9.3.	Proses Pembentukan Anggaran Dasar	150
9.4.	Perubahan Anggaran Dasar	152
9.5.	Anggaran Dasar Merupakan Bentuk Perjanjian	156
9.6.	Peranan Anggaran Dasar Bagi Koperasi Sebagai Badan Hukum	159
9.7.	Peranan Anggaran Dasar Bagi Anggota Koperasi	160
9.8.	Peranan Anggaran Dasar Bagi Perangkat Organisasi Koperasi	161
X.	ANALISIS KOPERASI DALAM ORGANISASI PASAR	163
10.1	Kebijaksanaan Harga Dalam Koperasi	164
10.2	Sasaran Perusahaan Koperasi	165
10.3	Koperasi Dalam Pasar Persaingan Sempurna	165
10.4	Koperasi Dalam Pasar Monopoli	175
10.5	Koperasi Dalam Pasar Oligopoli	180
10.6	Pasar Internal Koperasi	184
XI	MANAJEMEN KOPERASI	187
11.1	Manajemen Sebagai Profesi	188
11.2	Pengertian Manajemen	190
11.3	Fungsi Manajemen	191
11.4	Pemimpin dan Kepemimpinan	192

11.5	Kewibawaan, Kekuasaan, Tanggungjawab, dan Kewajiban	194
11.6	Manajemen Koperasi	196
11.7	Wewenang dan Tanggungjawab Dalam Manajemen Koperasi	198
11.8	Fungsi Manajemen Dalam Koperasi	199
XII	PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI	211
12.1	Beberapa Alasan Dilakukannya Pembinaan Oleh Pemerintah.....	213
12.2	Sikap Pemerintah	216
12.3	Kaitan Sikap Pemerintah dengan UU Koperasi	217
12.4	Dampak Peran Pemerintah	219
12.5	Bentuk Kebijakan Pemerintah	221
12.6	Dilema Peran Pemerintah	225
12.6	Sikap Pemerintah Indonesia	227
12.7	Masalah Pengembangan Koperasi di Indonesia	228
XIII	SUMBER MANFAAT KOPERASI	231
13.1	Keputusan Koperasi	232
13.2	Sumber Manfaat Koperasi	236
XIV	KOPERASI MENCIPTAKAN PARTISIPASI GANDA	245
14.1	Definisi Partisipasi	247
14.2	Jenis Partisipasi	247
14.3	Masalah Partisipasi	249
14.4	Biaya Partisipasi	251
14.5	Partisipasi dalam Three Angle Fit	256
XV	KOPERASI MENCIPTAKAN EFISIENSI	263
15.1	Gambaran Umum Teori Biaya	265
15.2	Kaitannya <i>Economies Of Scale, Return To Scale,</i> dan Fungsi Biaya	272
15.3	Koperasi Menciptakan <i>Economies of Scale</i>	275

XVI KOPERASI MENCIPTAKAN SUASANA BERUSAHA SAMBIL BELAJAR	279
16.1 Pentingnya Pendidikan Bagi Usaha Kecil di Era Globalisasi	281
16.2 Pengaruh Usaha Sambil Belajar Terhadap Efisiensi	283
16.3 Pengaruh Usaha Sambil Belajar Terhadap Perkembangan Organisasi	293
XVII KOPERASI MENCIPTAKAN HARGA SOSIAL	299
17.1 Gambaran Umum Pasar Monopoli	300
17.2 Harga Sosial Pada Koperasi Dalam Pasar Monopoli	304
XVIII KOPERASI MENCEGAH PRAKTIK RENTENIR	309
18.1 Beberapa Alasan yang Mendukung Didirikannya Koperasi	311
18.2 Keunggulan Koperasi Dalam Kegiatan Simpan Pinjam ...	313
18.3 Manfaat Simpan Pinjam Oleh Koperasi	318
18.4 Sejarah Singkat Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Memberantas Rentenir	320
XIX KOPERASI MENCIPTAKAN PELUANG BAGI PEMERINTAH SEBAGAI WIRAUSAHA	325
19.1 Jenis Kewirausahaan	327
19.2 Pentingnya Kewirausahaan Bagi Kope-Rasi	331
19.3 Kewirausahaan Koperasi (<i>Cooperative Entrepreneurship</i>)	332
19.4 Jenis Kewirausahaan Koperasi	334
19.5 Tahapan Pelaksanaan Kewirausahaan di Koperasi	339
19.6 Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kewirausahaan	339
19.7 Mengembangkan Sikap Wirauswasta	344
19.9 Peran Kewirausahaan Koperasi	345
DAFTAR PUSTAKA	349
INDEKS.....	357